

FAKTOR KUNCI DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Driving Factors in Private Forest Development in West Lombok)

Amiruddin¹, Sukardi², Addinul Yakin³, Halimatus Sa'diyah⁴ & MRT Mudhofir⁵

ABSTRACT

Community forest is a potential supply of wood raw materials and plays an important role in optimizing dry land use. West Lombok Regency is one of the two districts with the largest private forest area on the island of Lombok. The total area of private forest reaches 4,415 ha or about 10.7% of the administrative area of West Lombok Regency. Forest management activities involve various parties, from nurseries, planting to timber harvesting. Production and institutional aspects are important aspects in private forest development. This study aims to determine the driving factors in development of private forests, especially in the aspects of production and the role of actors in West Lombok Regency. The results showed that the lack of farmers' business capital, number and quality of plant seeds were important factors in the production aspects of private forest development. Forestry extension agents and the head of farmer groups play an important role in private forest management. The involvement of the Dodokan Mayosari Watershed Management Center (BPDAS) in providing seedlings and facilitating partnerships with community forest product wood processing industries has the potential to overcome current production constraints.

Keywords: community forest, interpretive structural modeling (ISM)

ABSTRAK

Hutan rakyat menjadi salah satu potensi bagi penyediaan bahan baku kayu serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari dua kabupaten dengan luas hutan rakyat terbesar di Pulau Lombok. Luas hutan rakyat mencapai 4.415 ha atau sekitar 10,7% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pengelolaan hutan rakyat seringkali melibatkan berbagai pihak mulai dari kegiatan pembibitan, penanaman hingga pemanenan kayu. Aspek produksi dan kelembagaan menjadi aspek penting dalam pengembangan hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan hutan rakyat terutama pada aspek kendala produksi dan peran aktor di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala aspek produksi pada pengelolaan hutan rakyat adalah minimnya modal usaha petani dan terbatasnya jumlah dan mutu bibit tanaman yang berkualitas. Petani dan Ketua Kelompok Tani merupakan aktor yang berperan penting dalam pengelolaan hutan rakyat saat ini. Keterlibatan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Mayosari dalam bantuan pengadaan bibit dan memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan kayu hasil hutan rakyat berpotensi dalam mengatasi kendala produksi saat ini.

Kata Kunci: interpretive structural modeling (ISM), sub sistem hutan rakyat

Author Institution : ¹²³⁴Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram; ⁵Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83125

Koresponding Author : amiruddin_12sept@yahoo.co.id

Articel History : Received 12 June 2020; received in revised form 2 July 2020; accepted 16 October 2020; Available online since 31 October 2020

I. PENDAHULUAN

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (Peraturan Menteri Kehutanan No. 88 tahun 2003). Sedangkan menurut Suharjito (2000), segala bentuk kegiatan budidaya pohon pada lahan sebenarnya merupakan bentuk usaha hutan rakyat.

Hutan rakyat merupakan salah satu sumber bahan baku bagi industri kayu di Indonesia (Puspitojati et. al. 2014). Selain untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun industri, hutan rakyat juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

Di Indonesia pada umumnya hutan rakyat dikembangkan pada areal lahan kering daerah atas (*upland areas*), Selain itu, budidaya hutan rakyat juga dapat dilakukan pada lahan pekarangan, kebun/*leuweung* hingga pematang dalam skala yang relatif sempit sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan lahan kering milik petani. Di Pulau Jawa, lokasi hutan rakyat umumnya terpecah-pecah dengan luasan yang relatif sempit. Rata-rata luasan dan kepemilikan hutan rakyat per keluarga yaitu <0,25–1 ha (Tien 2012; Jariyah & Wahyuningrum 2008).

Berdasarkan data penggunaan lahan Provinsi NTB (2017) luas hutan rakyat di NTB mencapai 127.681 hektar. Sebagian besar berada di Pulau Sumbawa yaitu 113.948,5 hektar (89,25%) dan sisanya di Pulau Lombok yaitu 13.732,5 hektar (10,75%). Luas hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat tercatat 4.414,50 hektar atau 18,61% dari potensi lahan kering yang ada. Dengan demikian, masih terbuka peluang

yang besar bagi pengembangan hutan rakyat di daerah ini.

Pengembangan hutan rakyat tidak hanya bertumpu pada aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, tetapi juga ditentukan oleh sistem kelembagaan yang ada. Menurut Hardjanto (2003), pengelolaan hutan rakyat mencakup empat subsistem, yaitu subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem kelembagaan. Subsistem produksi terdiri atas penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan (Hardjanto, 2003). Subsistem kelembagaan yaitu tata hubungan antar para pihak yang terlibat sebagai aktor dalam pengelolaan hutan rakyat, mulai dari penyedia *input*, petani sebagai produsen, lembaga pemasaran, industri pengolahan kayu, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, hingga dukungan dari lembaga-lembaga lain yang terkait.

Fadhil (2018) berpendapat bahwa dapat diperoleh suatu kerangka dasar terkait kelembagaan. Pertama, pihak yang terlibat, baik secara individual maupun secara kelompok sosial. Kedua, tata hubungan yang melingkupi di dalamnya yang disebut sebagai aspek struktural. Ketiga, aspek kultural, yaitu aturan main atau kesepakatan-kesepakatan di antara para pihak yang terlibat tersebut. Permasalahan dalam pengelolaan hutan rakyat sangat berhubungan dengan persoalan penataan kelembagaan yang memerlukan penelitian yang seksama. Kelembagaan yang dirasakan oleh banyak ahli ekonomi sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi pembangunan industri (Yustika, 2006). Sistem kelembagaan yang baik akan mampu memberikan insentif bagi pengembangan hutan rakyat, terutama bagi masyarakat/petani sebagai produsen.

Pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat menghadapi berbagai kendala, khususnya pada subsistem produksi dan kelembagaan. Kendala pada subsistem produksi antara lain menyangkut kondisi lahan yang kurang subur, keterbatasan akses petani terhadap bibit tanaman yang berkualitas, modal petani yang terbatas serta pengetahuan dan kemampuannya dalam budidaya tanaman yang relatif rendah. Sementara itu, subsistem kelembagaan dalam sistem pengelolaan hutan rakyat di daerah ini juga belum berjalan secara sinergis. Di antara sembilan aktor yang terlibat dalam pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat, yaitu: Petani, Ketua Kelompok Tani, Pengepul Kayu, Industri Penggergajian, BPDAS Dodokan Mayosari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Pemerintah Desa dan PT Kayu Lima Sejahtera (KLS) memiliki kedudukan dan peran pada level yang berbeda-beda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan hutan rakyat terutama kendala pada subsistem produksi dan peran aktor di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada Juli–September 2019. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Gambar 1).

B. Pengambilan Sampel

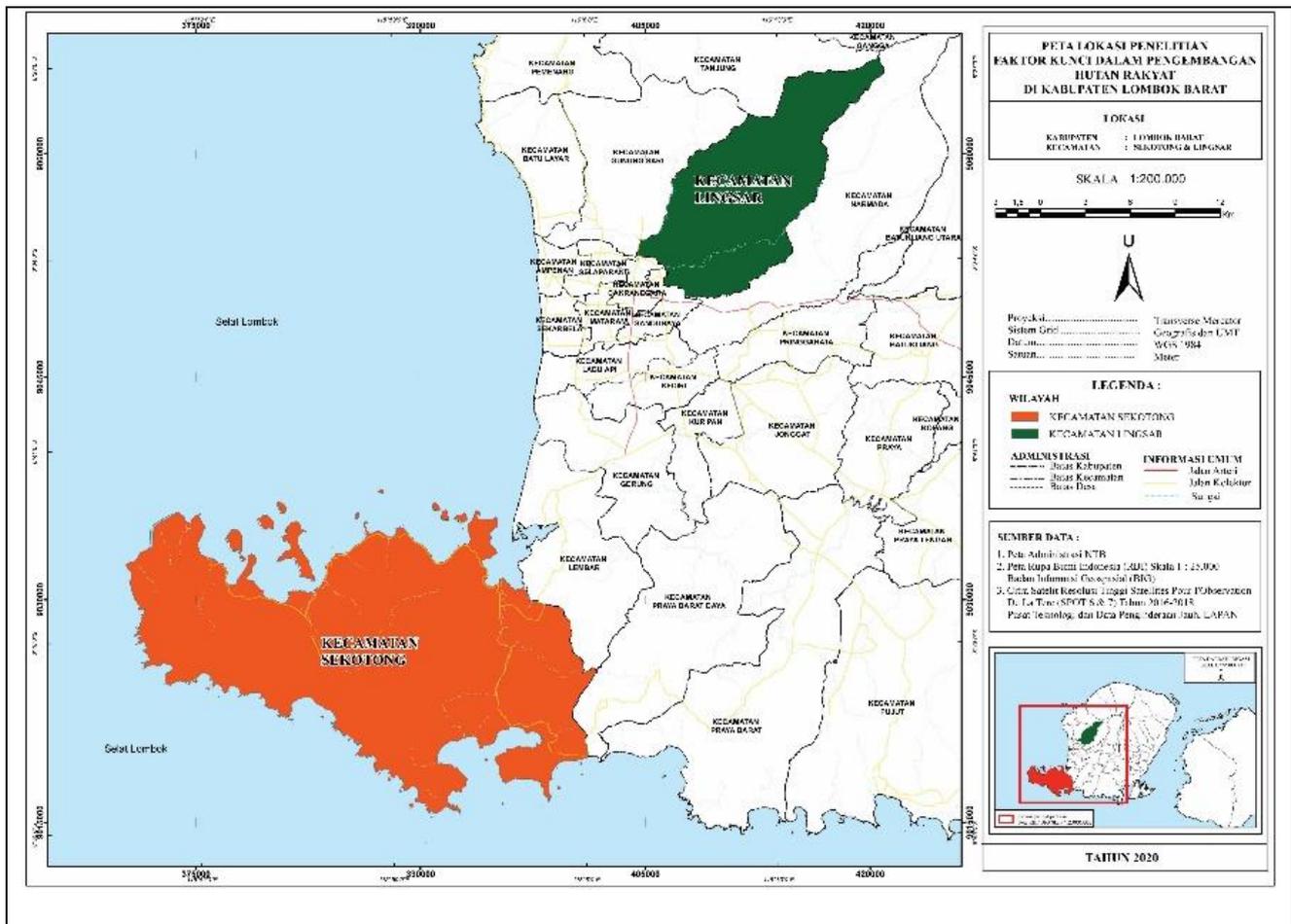
Data diperoleh dengan melakukan observasi

lapangan, wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner pada 10 orang petani hutan rakyat, penyuluh kehutanan (4 orang), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (2 orang) dan BPDAS Dodokan Mayosari (1 orang). Pemilihan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu untuk menentukan informan kunci, kemudian dilakukan teknik *snowball sampling* untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat pada lokasi penelitian.

C. Analisa Data

Analisis faktor kunci dalam subsistem produksi hutan rakyat dan aktor yang berperan dalam pengembangan hutan rakyat dilakukan dengan metode *Interpretative Structural Modeling* (ISM). Attira et. al. (2013) berpendapat bahwa ISM dilakukan untuk melihat hubungan antar aspek-aspek yang terkait dalam suatu kegiatan.

Analisis data diawali dengan identifikasi elemen-elemen utama yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat, untuk kemudian dibagi menjadi beberapa faktor yang saling berpengaruh (Attri 2013). Proses identifikasi elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan rakyat dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hubungan antar faktor disajikan dalam bentuk *Self-Instruction Matrix* (SSIM) yang kemudian ditransformasikan menjadi *Reachability Matrix* (RM). Hubungan antar elemen yang telah dituangkan pada RM disajikan dalam bentuk level pengaruhnya serta diagram ISM, sehingga diketahui struktur hubungan antar elemen-elemen yang berpengaruh.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Figure 1. Research location map

SSIM disusun dengan menggunakan simbol V, A, X, dan O, dengan:

- ${}_{ij}V_{ji}$ adalah $e = 1$ dan $e = 0$
- ${}_{ij}A_{ji}$ adalah $e = 0$ dan $e = 1$
- ${}_{ij}X_{ji}$ adalah $e = 1$ dan $e = 1$
- ${}_{ij}O_{ji}$ adalah $e = 0$ dan $e = 0$.

RM menggunakan bilangan biner yaitu dengan merubah simbol V, A, X dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Hasil perhitungan pada RM membagi elemen-elemen ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama merupakan *autonomous factors* yaitu faktor yang memiliki *driver power* dan *dependence power* yang rendah. Secara relatif sebenarnya faktor tersebut terpisah dari

sistem. Kuadran kedua adalah *dependent factors* yaitu faktor yang memiliki *drive power* lemah tetapi memiliki *dependence power* yang kuat. Kuadran ketiga adalah *linkage factors* yaitu faktor yang memiliki *driver power* dan *dependence power* yang kuat. Faktor tersebut dapat terkategori tidak stabil karena rentan mengalami pengaruh secara timbal balik. Kuadran keempat adalah *independent factors* yaitu faktor yang memiliki *driver power* kuat tetapi memiliki *dependence power* yang lemah. Faktor kunci biasanya termasuk ke dalam *independent factors* atau *linkage factors* (Attri 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Produksi Pengelolaan Hutan Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa elemen yang menjadi kendala dalam subsistem produksi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Elemen kendala utama terdiri atas lima faktor yaitu keterbatasan jumlah dan mutu bibit tanaman yang berkualitas (P1), minimnya jumlah modal petani (P2), pengetahuan petani tentang teknik budidaya tanaman rendah (P3), ketersediaan lahan (P4) dan tingkat kesuburan lahan (P5).

Kelima faktor yang ditemukan sebagai kendala dalam subsistem produksi hutan rakyat, memiliki hubungandan saling mempengaruhi satu sama lain (Tabel 1). Hubungan struktural kelima faktor dapat dikategorikan menjadi tiga level (Gambar 2). Hasil analisis menunjukkan keterbatasan jumlah dan mutu bibit tanaman yang berkualitas serta minimnya jumlah modal petani menjadi faktor dasar

yang mempengaruhi produktivitas hutan rakyat. Faktor kesuburan lahan dan pengetahuan dapat diatasi jika pengadaan bibit tanaman yang berkualitas dan minimnya jumlah modal petani telah terpenuhi. Ketersediaan lahan menjadi kendala terakhir yang dirasakan paling minim dampaknya oleh petani.

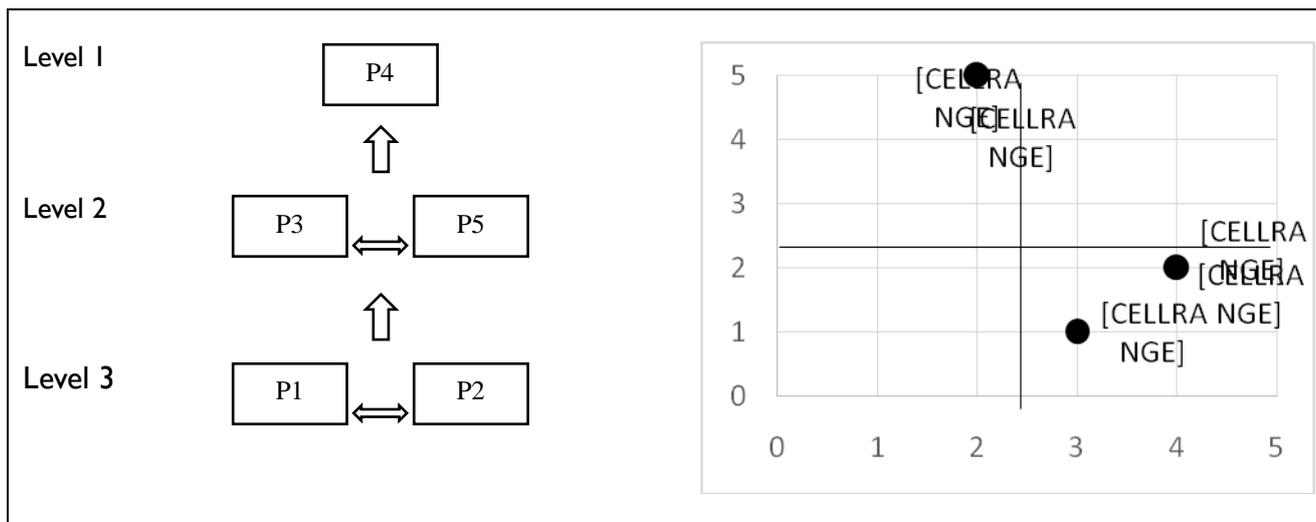
Kelima faktor kendala pada aspek produksi dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu *dependent factors* dan *independent factors*. Pengetahuan petani terkait teknik budidaya, ketersediaan lahan dan kesuburan lahan berada pada kelompok *dependent factors* (Kuadran II) atau masuk kategori faktor yang memiliki ketergantungan tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah, sedangkan keterbatasan jumlah dan mutu bibit tanaman yang berkualitas serta minimnya jumlah modal berada pada kelompok *independent factors* (Kuadran IV) atau masuk kategori faktor yang memiliki ketergantungan rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Tabel 1. Structural Self Interaction Matrix (SSIM) kendala subsistem produksi hutan rakyat

Table 1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) for production subsystem problems in private Forest

Kendala Produksi (Production Constraints)					
	P1	P2	P3	P4	P5
P1	X	V	V	V	V
P2	A	X	V	V	V
P3	A	A	X	O	V
P4	A	A	O	X	O
P5	A	A	A	O	X

Sumber (source): Data primer diolah, 2019 (Data collection, 2019)



Gambar 2 Faktor kendala utama pada subsistem produksi pengelolaan hutan rakyat
Figure 2. Main factors of production subsystem problems in private Forest

Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa hama dan penyakit tanaman tidak menjadi faktor kendala dalam subsistem produksi hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini berbeda dengan pengelolaan hutan rakyat di daerah-daerah yang lain. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa pengelolaan hutan rakyat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera seringkali terkendala oleh serangan hama dan penyakit pada tanaman (Safe'i, 2013; Oktaviyani, Indriyatno, Surnayanti, 2017).

Hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat umumnya diusahakan dalam skala luas lahan yang relatif sempit dengan pola agroforestry, yaitu kombinasi antara berbagai jenis tanaman penghasil kayu dengan aneka jenis tanaman bukan kayu. Pengelolannya pun belum dilakukan secara intensif, sehingga secara alamiah mampu menekan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada pengelolaan hutan rakyat di Pulau Jawa seperti dilaporkan oleh Hardjanto (2017) dan Suprpto (2010).

Menurut Pribadi (2010) dan Setyawan (2017), intensitas penanaman tanaman sejenis yang tinggi dan dalam luasan yang besar pada hutan rakyat, memberikan peluang bagi inang hama dan penyakit tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang.

B. Peran Aktor dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat melibatkan beberapa aktor dengan peran masing-masing. Terdapat sembilan aktor yang berperan penting dalam pengelolaan hutan rakyat, yaitu; Petani (A1), Ketua Kelompok Tani (A2), Pengepul Kayu (A3), Industri Penggergajian (A4), BPDAS Dodokan Mayosari (A5), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK (A6), Penyuluh Kehutanan (A7), Pemerintah Desa (A8) dan PT KLS (A9) sebagai perusahaan swasta. Dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, hubungan antar aktor saling mempengaruhi satu sama lain (Tabel 2).

Tabel 2. Initial Reachability Matrix (IRM) kendala subsistem kelembagaan hutan rakyat
Table 2. Initial Reachability Matrix (IRM) for institutional subsystem problems in private forest

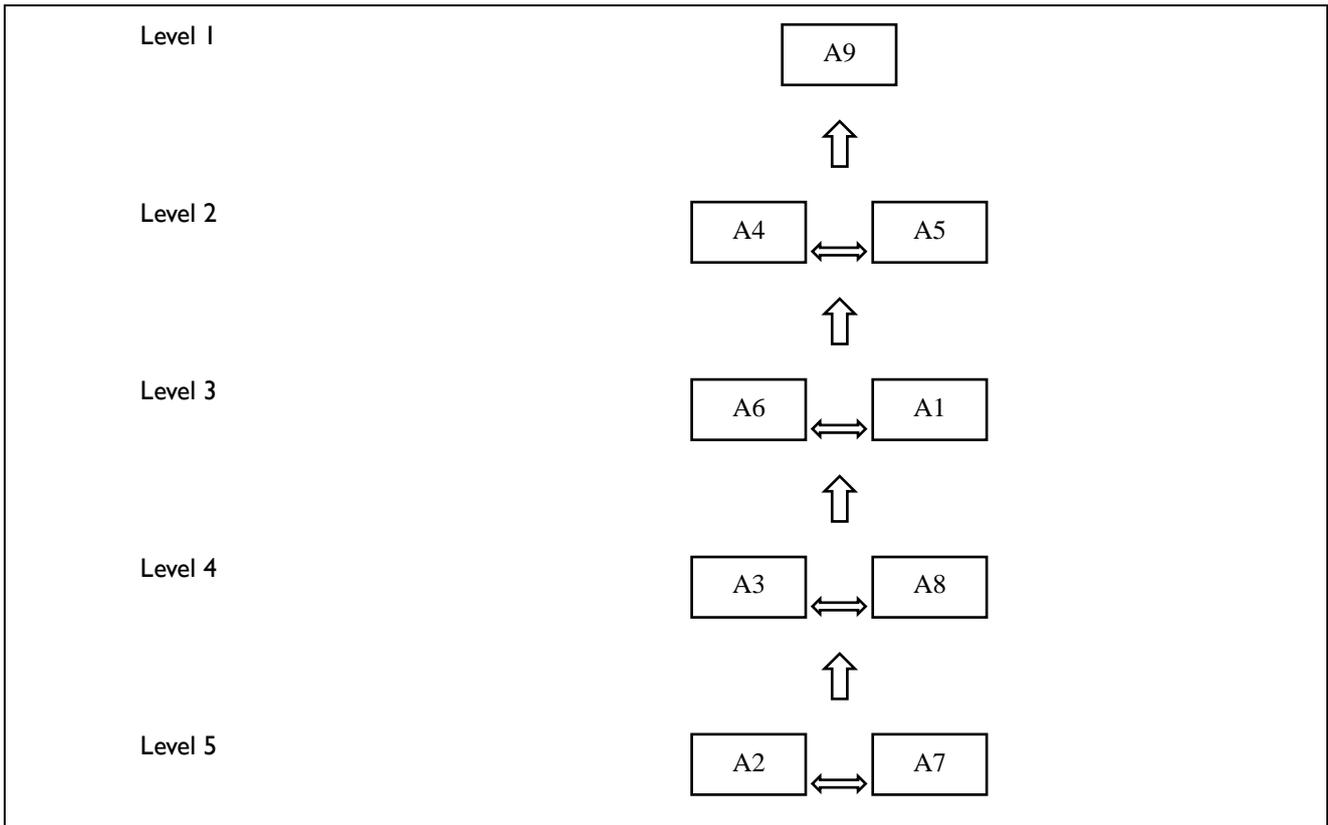
Kendala Kelembagaan (Institutional Constraints)											
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	DP	R
A1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3
A2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	5
A3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	4	4
A4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2
A5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2
A6	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	3
A7	0	1	0	0	1	1	1	0	1	5	5
A8	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
D	4	4	3	2	5	3	2	3	3		
R	4	4	3	2	5	3	2	3	3		

Hubungan struktural kesembilan aktor yang berperan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dikategorikan menjadi lima level (Gambar 3). Level 5 (lima) menunjukkan bahwa faktor kendala tersebut yang menjadi permasalahan dasar. Semakin kecil level dari kendala yang dihadapi maka faktor kendala tersebut sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.

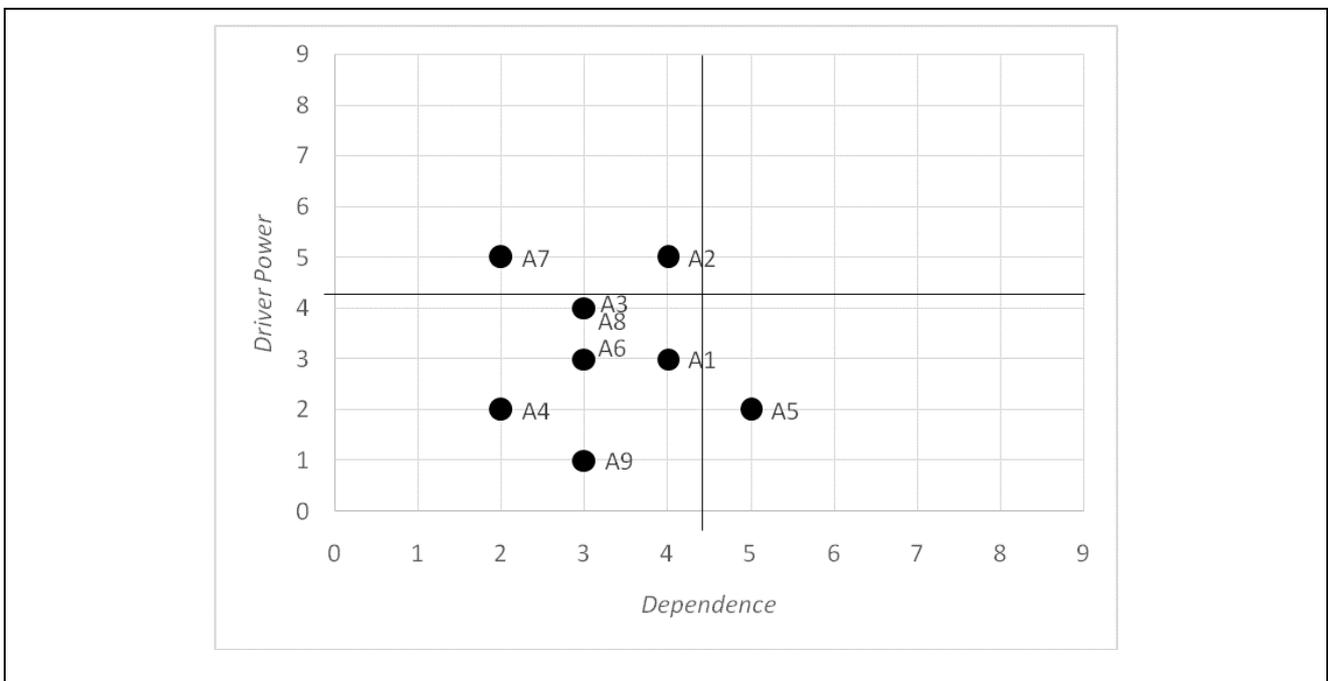
Ketua Kelompok Tani (A2) dan Penyuluh Kehutanan (A7) merupakan aktor yang berada pada level paling dasar (Level 5). Posisi tersebut juga menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar kepada aktor-aktor lainnya. Pengepul Kayu (A3) dan Pemerintah Desa (A8) memiliki tingkat peranan pada level yang sama, yaitu pada level 4. Petani (A1) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (A6) berada pada level setelah Pengepul Kayu dan Pemerintah Desa (level 3). Industri Penggergajian (A4) dan BPDAS (A5) berada pada level 2, sedangkan pada level

berikutnya (level 1) adalah PT KLS (A9). Data menunjukkan bahwa saat ini PT KLS sebagai perusahaan swasta belum mampu menyerap hasil produksi hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat, sehingga belum berperan banyak bagi pengelolaan hutan rakyat.

Terdapat tiga kategori aktor yang berperan dalam pengelolaan hutan rakyat (Gambar 4). Petani, Pengepul Kayu, Industri Penggergajian, DLHK, Pemerintah Desa dan PT KLS tergolong ke dalam kategori *autonomous factors* (Kuadran I) yang artinya memiliki pengaruh yang tergolong kecil. BPDAS Dodokan Mayosari termasuk ke dalam kategori *dependent factors* yang artinya memiliki ketergantungan yang besar namun pengaruh yang kecil. Sedangkan Ketua Kelompok tani dan Penyuluh Kehutanan tergolong ke dalam kategori *independent factors* yang artinya memiliki ketergantungan yang kecil namun pengaruhnya besar terhadap aktor yang lain.



Gambar 3. Struktur aktor dalam pengelolaan hutan rakyat
Figure 2. Levelized structure of actors in private forest development



Gambar 4 Kategori kepentingan aktor dalam pengelolaan hutan rakyat
Figure 4. Fuzzy MICMAC analysis of actors in private forest development

C. Faktor Kunci dalam Pengembangan Hutan Rakyat

Pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat dapat dilakukan dengan prioritas penanganan faktor kunci, baik pada kendala subsistem produksi maupun peran aktor dalam subsistem kelembagaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dua faktor kunci pada subsistem produksi adalah keterbatasan jumlah dan mutu bibit tanaman yang berkualitas serta minimnya jumlah modal usaha, sedangkan pada subsistem kelembagaan, Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Kehutanan merupakan dua aktor yang berperan sebagai faktor kunci dalam pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat.

Pengadaan bibit tanaman menjadi salah satu kendala yang seringkali ditemukan pada pengelolaan hutan rakyat di Indonesia (Butar et al. 2019, Pratama et al. 2019). Ketersediaan bibit pada lokasi penelitian tergolong masih sulit dipenuhi, baik yang tersedia secara komersil maupun yang bersumber dari bantuan pemerintah. Pengadaan bibit pada usaha hutan rakyat umumnya diperoleh petani dengan cara membeli, namun selama observasi lapangan tidak ditemukan penjual bibit dalam jumlah besar di lokasi penelitian. Sebagian petani membeli bibit dari penjual yang lewat dengan menggunakan mobil *pick-up*, namun saat ini sudah tidak ada lagi penjual sejenis. Sumber bibit yang berasal dari bantuan pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta Kebun Bibit Rakyat (KBR). Selain itu, petani juga dapat memperoleh bibit melalui kemitraan dengan pihak pembeli perseorangan maupun perusahaan

melalui program kemitraan.

Aspek modal merupakan salah satu permasalahan yang ditemui pada pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Kelembagaan pendanaan merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengatasi masalah minimnya bantuan modal pada hutan rakyat (Bramasto 2010, Fauzan et al. 2019). Lembaga yang dapat berperan melalui skema tersebut antara lain Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau melalui Koperasi Simpan Pinjam. Kredit pinjaman melalui BLU merupakan upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Koperasi sendiri merupakan bentuk organisasi petani sebagai penyedia dana usaha.

Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Kehutanan dapat dikategorikan sebagai aktor kunci dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Pada dasarnya pengembangan hutan rakyat dapat dilakukan melalui pengaruh kedua aktor tersebut karena saat ini memiliki hubungan yang kuat dengan aktor-aktor lainnya. Penguatan kelompok tani melalui ketua kelompok dapat menjadi salah satu strategi dalam pengembangan hutan rakyat di suatu kawasan (Fauzan et al. 2019). Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemberian pelatihan dan pembinaan melalui penyuluhan menjadi salah satu strategi internal yang perlu dilakukan dalam pengembangan hutan rakyat. Butar et al. (2019) menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan oleh penyuluh kehutanan dapat meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat terutama mengenai fungsi dari segi ekologi dan ekonominya.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Mayosari merupakan aktor dengan ketergantungan

yang tinggi namun memiliki pengaruh tergolong kecil. Program KBR dapat menjadi salah satu langkah memperkuat pengaruh BPDAS pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Mauludi (2014) menemukan bahwa program KBR yang dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia sebenarnya dapat lebih dioptimalkan yaitu dengan merubah orientasi pelaksanaan kepada petani hutan.

Permasalahan pada aspek produksi berupa penyediaan bibit dan minimnya jumlah modal juga dapat diatasi melalui kemitraan dengan salah satu aktor yang sudah terlibat saat ini yaitu PT KLS. Peran PT KLS saat ini sedikit berbeda dengan pembeli perseorangan karena sudah mulai menginisiasi program kemitraan melalui kelompok tani. Bentuk kemitraan yang saat ini sedang dinisiasi oleh PT KLS dapat berperan dalam pengadaan bibit serta penguatan modal bagi petani. Kemitraan antara perusahaan kayu dengan petani hutan rakyat perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan hutan rakyat yang berkelanjutan (Setiawan 2014).

IV. KESIMPULAN

Pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Barat dapat dilakukan dengan mengatasi kendala utama berupa pengadaan bibit tanaman dan minimnya jumlah modal melalui penguatan aktor ketua kelompok tani dan penyuluh kehutanan yang saat ini merupakan aktor kunci dalam pengelolaan hutan rakyat. Pengaruh BPDAS dan PT KLS sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan dapat diperkuat terutama dalam fungsinya mengatasi kendala utama salah satunya melalui program KBR dan kemitraan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Attri R, Dev N, & Sharma V. 2013. Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. *Research Journal of Management Sciences*. 2(2): 3-8.
- Butar BV, Duryat & Hilmanto R. 2019. Strategi Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Bandar dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 7 No. 1, Januari 2019 (110-117).
- BPS Provinsi NTB. 2018. Luas Lahan Menurut Penggunaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017. Maharani: Mataram.
- Fadhil R. 2018. Strategi Pengembangan Kelembagaan Agroindustri Kopi Gayo. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fauzan H, Sulistyawati E. & Lastini T. 2019. Strategi Pengelolaan untuk Pengembangan Hutan Rakyat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 7 No. 2, Mei 2019 (164-173).
- Hardjanto. 2003. Keragaman dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hardjanto. 2017. *Pengelolaan Hutan Rakyat*. PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Jariyah, N. A., & Wahyuningrum, N. (2008). Karakteristik hutan rakyat di Jawa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1). Puspitojati, T., Rachman, E., Ginoga, K. L., & Darusman, D. (2014). Hutan tanaman pangan: realitas, konsep, dan pengembangan. Penerbit PT Kanisius.

- Mauludi AS. 2014. Dinamika Pengelolaan Hutan Rakyat dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Bogor. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Oktaviyani ES, Indriyatno & Surnayanti. 2017. Identifikasi Jenis Tanaman Hutan Rakyat Dan Pemeliharaannya Di Hutan Rakyat Desa Kelungu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 5 No.2, April 2017 (63—77).
- Pratama Aj. & Siswoko BD. 2019. Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Dusun Menggoran Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Pribadi, A. 2010. Serangan hama dan tingkat kerusakan daun akibat hama defoliator pada tegakan jabon (*Anthocephalus cadamba* Miq.). *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 7(4), 451-458.
- Safe'i R., Hardjanto, Supriyanto & Sundawati L. 2013. Pengembangan Metode Penilaian Kesehatan Hutan Rakyat Sengon (*Falcataria moluccana* (Miq.) Barneby & J.W. Grimes). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* Vol. 12 No. 3, Desember 2013, 175-187.
- Setiawan H, Barus B. & Suwardi. 2014. Analisis Potensi Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah. *Majalah Ilmiah Globë*, 16 No. 1 Juni 2014: 69-76.
- Setyawan YP. 2017. Serangga yang Berasosiasi dengan Sengon *Falcataria moluccana* (Miq.) Barneby & J.W. Grimes di Bogor. (Tesis). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suharjito D. Apa Yang Dimaksud Hutan Rakyat?. Di dalam Didik Suharjito (ed.) *Hutan Rakyat di Jawa Peranannya dalam Perekonomian Desa*. 2000. Bogor: Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Suprpto, E. 2010. Hutan rakyat: aspek produksi, ekologi dan kelembagaan. Lembaga ARuPA, Yogyakarta. <https://arupa.or.id/sources/uploads/2010/08/Hutan-Rakyat-Aspek-Produksi-Ekologi-dan-Kelembagaan.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020.
- Tien L. 2012. Tipologi Desa Hutan Rakyat: Kasus Di Kabupaten Ciamis [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yustika A.E. 2012. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan. Penerbit Erlangga. Penerbit Erlangga (ID): Jakarta.